

Rasionalitas Politik Generasi Milenial terhadap Kandidat Mantan Narapidana Korupsi di Pemilu DPD RI Sulawesi Tenggara

Saptarina Imelda Madani^{1*}

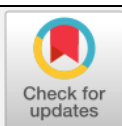
¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, 93232, Kendari-Indonesia

Coesspending Author: saptarina.rina83@gmail.com

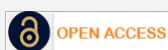
INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Dikirim: 20 Januari 2024;
Diterima: 23 Maret 2024;
Dipublikasi: 30 Maret 2024;



Copyright © 2024. Owned by
Author(s), published by
Polikrasi

*This is an open-access article.
License:*

*Attribution-NonCommercial-
ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

How to cite:

Madani, S. I. (2024). Rasionalitas Politik Generasi Milenial terhadap Kandidat Mantan Narapidana Korupsi di Pemilu DPD RI Sulawesi Tenggara. *Journal of Politics and Democracy*, 3(2), 91-100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan rasional generasi milenial terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara periode 2019–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan subjek delapan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Halu Oleo yang mengetahui adanya pencalonan mantan narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial cenderung menolak kandidat bermasalah dengan dasar experience value berupa kekecewaan terhadap kasus korupsi. Namun demikian, sebagian responden tetap membuka kemungkinan untuk memilih mantan narapidana apabila memiliki visi, misi, serta rekam jejak kinerja yang memuaskan (decision value). Temuan ini menegaskan bahwa perilaku politik generasi milenial tidak bersifat hitam putih, melainkan dipandu oleh kombinasi pengalaman masa lalu dan kalkulasi rasional atas manfaat politik di masa depan.

This study aims to analyze the rational choices of the millennial generation regarding the nomination of former corruption convicts in the Southeast Sulawesi electoral district for the Regional Representative Council (DPD RI) in the 2019–2024 period. Using a qualitative-descriptive approach, the research involved eight Political Science students from Halu Oleo University who were aware of the nomination of former corruption convicts. The findings reveal that millennials tend to reject problematic candidates based on experience value, reflecting disappointment with past corruption cases. However, some respondents were still willing to support such candidates if they demonstrated clear vision, mission, and satisfactory political performance (decision value). These results indicate

that millennial political behavior is not strictly dichotomous but shaped by the interplay of past experiences and rational calculations of future political benefits.

Keywords: DPD RI Sulawesi Tenggara, Generasi Milenial, Mantan Narapidana Korupsi, Perilaku Politik, Pilihan Rasional

1. Pendahuluan

Pemilu Serentak 2019 yang digelar pada 17 April 2019 menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pesta demokrasi lima tahunan ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan nasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana berbagai kelompok pemilih, khususnya generasi milenial, mengambil keputusan politiknya. Generasi milenial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Politik Universitas Halu Oleo yang berjumlah 285 orang. Sebagai kelompok yang akrab dengan isu politik, mahasiswa menjadi representasi penting untuk memahami bagaimana sikap pemilih muda terbentuk dalam menghadapi kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.

Fenomena penting yang melatarbelakangi penelitian ini adalah munculnya mantan narapidana korupsi yang tetap mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Hal ini menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai integritas dan moralitas calon. Misalnya, kasus mantan Wali Kota Kendari, Mansyur Masie Abunawas, yang pernah divonis dua tahun penjara akibat korupsi aset pemerintah kota (Gafur, 2017). Kasus lain adalah Ahmad Yani Muluk, mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada anggaran sekretariat DPRD 2003–2004 dengan kerugian negara mencapai Rp 5 miliar (Detiknews, 2012). Keikutsertaan mantan narapidana korupsi dalam kontestasi elektoral menimbulkan pro-kontra, terutama di kalangan mahasiswa Ilmu Politik yang kerap mendiskusikan isu ini dalam forum akademik.

Problematisasi muncul ketika norma hukum yang ada ternyata memberi celah bagi mantan narapidana korupsi untuk kembali mencalonkan diri. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU No. 20 Tahun 2018 sempat mencoba melarangnya, Mahkamah Agung membatalkan aturan tersebut dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu (Tanjung & Saraswati, 2018). Kondisi ini menimbulkan dilema: di satu sisi hak politik setiap warga negara dijamin konstitusi, namun di sisi lain terdapat kebutuhan untuk menjaga integritas demokrasi dari figur bermasalah. Bagi generasi milenial yang dikenal kritis, melek teknologi, dan cenderung anti-korupsi (Ali & Purwandi, 2016; Brokaw, 1998), situasi ini menjadi ujian bagi rasionalitas politik mereka dalam menentukan pilihan.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang perilaku pemilih di Indonesia lebih menekankan faktor sosiologis atau psikologis, seperti loyalitas partai, identitas sosial, dan pengaruh lingkungan (Lazarsfeld et al., 1948; Campbell et al., 1960; Sastroatmodjo, 1995). Kajian tentang pilihan politik generasi milenial terhadap kandidat bermasalah, khususnya mantan narapidana korupsi, masih jarang dilakukan. Padahal, isu ini sangat relevan karena generasi milenial merupakan kelompok pemilih terbesar pada Pemilu 2019 (BPS, 2020) dan memiliki karakteristik unik dalam mengakses informasi serta menilai isu politik (Putri, 2018; Nurhaerah, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab kekosongan tersebut dengan menggunakan kerangka *rational choice theory*, khususnya indikator *experience value* dan *decision value*

(Kahneman & Tversky, 1979), untuk menganalisis bagaimana mahasiswa Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mengambil keputusan politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi di DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara 2019–2024.

Selain itu, penelitian mengenai perilaku pemilih muda di Indonesia umumnya masih terfokus pada aspek partisipasi politik dan keterlibatan mereka dalam kampanye melalui media sosial (Tapsell, 2018; Pratama et al, 2023). Padahal, pemahaman mengenai bagaimana generasi milenial bersikap terhadap calon yang memiliki catatan kriminalitas politik, khususnya korupsi, sangat penting untuk menilai kualitas demokrasi. Korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian besar bagi negara serta mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga politik (Transparency International, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap sikap generasi milenial terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi tidak hanya merefleksikan preferensi politik, tetapi juga mengindikasikan sejauh mana nilai integritas dan akuntabilitas dijunjung oleh pemilih muda.

Di sisi lain, studi ini juga memiliki relevansi praktis dalam konteks penguatan kebijakan elektoral di Indonesia. Wacana larangan eks nabi korupsi menjadi calon legislatif yang pernah diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 dan kemudian dibatalkan Mahkamah Agung menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan hukum, politik, dan etika demokrasi (Tanjung & Saraswati, 2018). Dengan memahami bagaimana generasi milenial – sebagai kelompok pemilih terbesar – merespons fenomena ini, penelitian ini dapat memberikan masukan empiris bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu mengenai urgensi regulasi yang berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga relevan bagi pengembangan praktik demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pilihan rasional generasi milenial terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi di DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian perilaku pemilih, khususnya dalam mata kuliah sosiologi politik. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat untuk memahami pentingnya pemilihan yang rasional dalam menghasilkan wakil rakyat berintegritas. Sementara secara metodologis, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan mengenai perilaku politik generasi muda dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena pilihan rasional generasi milenial terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami makna di balik tindakan sosial dengan cara berinteraksi langsung melalui wawancara dan pengamatan (Moleong, 2008; Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian dipusatkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, dengan pertimbangan bahwa subjek penelitian adalah mahasiswa Ilmu Politik yang akrab dengan isu demokrasi, pemilu, dan politik kontemporer. Populasi penelitian mencakup 285 mahasiswa aktif angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019, namun peneliti hanya memilih delapan orang informan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria utama mahasiswa yang mengetahui adanya pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019

di DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara. Teknik ini dipilih karena dalam penelitian kualitatif, kedalaman informasi lebih diutamakan daripada jumlah responden (Creswell, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara daring karena adanya pandemi Covid-19, yang mengharuskan proses pembelajaran dilakukan secara online. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari arsip, dokumen resmi, dan catatan yang relevan, sedangkan studi pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis melalui literatur akademik dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh (Miles & Huberman, 1994; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006) untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari hasil wawancara. Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai pilihan rasional generasi milenial terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena pilihan politik generasi milenial dalam konteks demokrasi kontemporer menjadi perhatian banyak peneliti, mengingat kelompok ini merupakan segmen pemilih terbesar di Indonesia pada Pemilu 2019 (BPS, 2020). Generasi milenial dikenal sebagai kelompok yang melek teknologi, kritis terhadap isu sosial-politik, serta cenderung menolak praktik korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crime* (Ali & Purwandi, 2016; Transparency International, 2020). Dalam kajian politik, sikap pemilih muda sering dipahami melalui kerangka *rational choice theory* yang menekankan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi dan rasionalitas pribadi (Downs, 1957; Kahneman & Tversky, 1979). Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana generasi milenial merespons keberadaan kandidat mantan narapidana korupsi dalam kontestasi politik, apakah mereka tetap menggunakan pertimbangan rasional atau terpengaruh faktor lain.

Teori pilihan rasional menekankan bahwa pemilih akan memilih opsi yang memberi nilai utilitas tertinggi bagi dirinya. Kahneman dan Tversky (1979) membagi rasionalitas ke dalam dua indikator penting, yaitu *experience value* dan *decision value*. *Experience value* berkaitan dengan pengalaman nyata, seperti rasa puas atau kecewa terhadap perilaku kandidat sebelumnya, sedangkan *decision value* berkaitan dengan daya tarik atau harapan masa depan yang ditawarkan oleh kandidat. Kerangka ini relevan untuk memahami perilaku milenial, sebab mereka cenderung menilai kandidat bukan hanya dari janji politik, tetapi juga dari rekam jejak dan reputasi yang nyata (Putri, 2018; Nurhaerah, 2019). Dengan demikian, pilihan milenial terhadap mantan narapidana korupsi dapat dilihat sebagai hasil tarik-menarik antara kekecewaan terhadap kasus korupsi dan penilaian terhadap visi, misi, serta kinerja kandidat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa isu korupsi memiliki dampak besar terhadap perilaku pemilih muda. Studi internasional menegaskan bahwa generasi muda cenderung lebih intoleran terhadap praktik korupsi dibanding generasi yang lebih tua, karena mereka lebih terhubung dengan informasi digital dan lebih sensitif terhadap isu integritas politik (Grönlund & Setälä, 2012; Stokes et.al, 2013). Di Indonesia, penelitian Pratama, Widodo, dan Maulia (2023) menunjukkan bahwa media digital berperan penting dalam membentuk partisipasi politik milenial, termasuk dalam memperkuat sikap kritis terhadap politisi bermasalah. Namun, studi

lain mengingatkan bahwa rasionalitas pemilih tidak selalu linier; dalam kondisi keterbatasan pilihan, pemilih bisa saja memilih kandidat dengan rekam jejak bermasalah jika kandidat tersebut dianggap lebih berpengalaman atau memiliki reputasi kerja yang lebih jelas (Campbell et al., 1960; Tanjung & Saraswati, 2018).

Dengan landasan literatur tersebut, pembahasan mengenai pilihan rasional generasi milenial terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi akan diarahkan pada dua subaspek utama, yakni Pilihan Rasional Berdasarkan Experience Value dan Pilihan Rasional Berdasarkan Decision Value. Kedua subbab ini akan memperlihatkan bagaimana sebagian milenial menolak mantan narapidana korupsi karena pengalaman buruk yang ditimbulkan (experience value), sementara sebagian lain masih membuka ruang untuk mempertimbangkan kandidat tersebut apabila reputasi, visi-misi, atau kinerja politiknya dianggap memberikan manfaat (decision value).

Pilihan Rasional Berdasarkan Experience Value

Konsep Experience Value dapat dipahami sebagai rasa puas atau kecewa yang muncul dari pengalaman nyata seseorang terhadap hasil sebuah pilihan politik. Ketika pengalaman yang dihasilkan bersifat positif, maka kemungkinan besar individu akan mengulangi pilihan yang sama pada kesempatan berikutnya. Sebaliknya, jika pengalaman yang muncul bersifat negatif, misalnya karena rekam jejak calon legislatif terkait kasus korupsi, maka kecenderungan pemilih untuk kembali memilih kandidat tersebut akan menurun secara signifikan. Dalam konteks ini, para pemilih, khususnya generasi milenial, memberikan penilaian secara rasional terhadap calon legislatif berdasarkan pengalaman masa lalu yang mereka alami maupun ekspektasi terhadap kandidat yang bersih dari kasus hukum.

Hasil wawancara memperlihatkan pola penilaian yang konsisten. Sejumlah responden menegaskan bahwa mereka tidak memilih mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai senator. Narasi yang diungkapkan responden menunjukkan preferensi untuk memberikan kesempatan kepada kandidat baru yang meskipun belum memiliki rekam jejak politik yang menonjol, tetap dianggap lebih bernilai secara moral dan lebih menjanjikan dalam jangka panjang. Misalnya, salah satu informan menekankan bahwa meskipun calon baru belum tentu menghasilkan kebijakan konkret, setidaknya mereka belum terbukti melakukan pelanggaran serius seperti korupsi. Hal ini mencerminkan bentuk pengalaman negatif yang kemudian menjadi pertimbangan rasional bahwa kerugian yang mungkin timbul dari memilih calon baru dipandang lebih kecil dibandingkan risiko memilih kembali mantan narapidana korupsi yang berpotensi mengulangi perbuatannya. Pernyataan serupa muncul dari beberapa informan lain yang menegaskan sikap antipati terhadap kandidat dengan latar belakang korupsi. Keputusan mereka untuk menolak kandidat semacam itu merupakan wujud evaluasi dari pengalaman buruk yang menunjukkan bahwa praktik korupsi diposisikan sebagai kejahatan besar yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, memilih kandidat baru yang bersih meski reputasinya belum mencolok dipersepsikan lebih bernilai karena membuka peluang terjadinya perubahan positif di masa depan.

Hasil wawancara juga menegaskan pentingnya norma hukum sebagai faktor penguat pengalaman politik generasi milenial. Beberapa informan merujuk pada regulasi, khususnya PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 butir g, yang menyatakan bahwa mantan narapidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih tidak layak mencalonkan diri sebagai senator atau legislatif. Keberadaan aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif tetapi juga

sebagai pijakan rasional bagi pemilih untuk mengafirmasi keputusan mereka menolak kandidat bermasalah. Dengan demikian, regulasi ini memperkuat bobot pengalaman negatif yang dimiliki pemilih terhadap figur koruptif karena memberikan dasar legal atas ketidakpercayaan terhadap mantan narapidana korupsi. Keberadaan aturan hukum ini juga membentuk kerangka kognitif bagi generasi milenial dalam mengingat kembali pengalaman politik mereka. Mereka tidak hanya berpegang pada preferensi moral atau pengalaman empiris, tetapi juga pada legalitas yang diakui secara formal. Hal ini menegaskan bahwa perilaku memilih dipandu oleh kombinasi antara pengalaman nyata, regulasi yang mengikat, serta kalkulasi rasional atas risiko yang melekat pada kandidat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, generasi milenial merasa bahwa keputusan mereka untuk menolak kandidat bermasalah memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi moral dan legitimasi legal, yang keduanya semakin memperkuat posisi pengalaman negatif dalam pilihan politik.

Sikap ini juga menunjukkan adanya dimensi psikologis berupa keinginan untuk menjaga integritas sistem politik. Generasi milenial tidak hanya menimbang risiko praktis dari pengalaman memilih kandidat koruptif, tetapi juga memproyeksikan konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Pemilihan kandidat bersih dipandang sebagai bentuk investasi politik yang didorong oleh pengalaman pahit masa lalu, untuk membangun kultur anti-korupsi dalam lembaga legislatif. Dengan kata lain, pengalaman yang telah terjadi menjadi dasar bagi pemilih untuk menilai bahwa keuntungan dari memilih figur bersih tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga memberikan manfaat kolektif yang diyakini akan tercipta apabila figur-figur bebas korupsi mendapatkan ruang yang lebih besar dalam struktur politik.

Temuan ini menunjukkan bahwa generasi milenial menggunakan logika rasional dalam menentukan pilihan politik dengan bertumpu pada pengalaman masa lalu. Mereka lebih memilih kandidat yang memiliki latar belakang bersih dari korupsi, baik kandidat baru maupun kandidat lama dengan reputasi sederhana. Asumsi yang mendasari adalah bahwa pengalaman memilih kandidat bersih akan berbuah pada kepentingan masyarakat yang lebih besar dibandingkan memilih kandidat dengan rekam jejak korupsi yang cenderung memperkaya diri sendiri. Sikap ini dapat dipahami sebagai strategi rational choice, di mana pemilih melakukan evaluasi atas pengalaman masa lalu dan menimbang kembali risiko di masa depan sebelum membuat keputusan.

Preferensi generasi milenial dalam konteks ini tidak sekadar merupakan ekspresi emosional atau moral, melainkan refleksi dari evaluasi terhadap pengalaman politik yang telah mereka alami. Mereka mengidentifikasi bahwa manfaat jangka panjang dari memilih calon yang bersih lebih besar dibandingkan risiko besar yang melekat pada mantan narapidana korupsi. Akumulasi kekecewaan terhadap praktik korupsi menjadi landasan kuat bagi pemilih untuk menggeser dukungan politiknya kepada kandidat alternatif, meskipun kandidat tersebut masih minim pengalaman politik. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana logika pilihan rasional berbasis pengalaman dapat menjelaskan pola perilaku elektoral generasi muda di Indonesia dalam menghadapi dilema antara memilih kandidat berpengalaman yang bermasalah secara moral dibandingkan kandidat baru yang relatif bersih tetapi belum teruji rekam jejak politiknya.

Pilihan Rasional Berdasarkan Decision Value

Decision Value berkaitan dengan penilaian seseorang terhadap konsekuensi dan situasi yang akan dialami ketika ia mengambil suatu tindakan, termasuk dalam konteks politik elektoral. Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa generasi milenial tidak hanya

menimbang pengalaman masa lalu kandidat, tetapi juga mengkalkulasi potensi manfaat yang mungkin diperoleh di masa depan dari keputusan politik yang diambil. Pertimbangan ini menegaskan bahwa pemilih tidak sekadar mengandalkan moralitas bersih atau ketiadaan kasus hukum, melainkan juga menilai sejauh mana rekam jejak kinerja dan reputasi politik kandidat mampu memberikan kepastian nilai dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa informan menegaskan bahwa mereka tetap bersedia memilih calon senator yang memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana korupsi apabila calon tersebut menunjukkan rekam jejak politik yang baik, visi misi yang jelas, serta reputasi yang memuaskan selama menjabat. Misalnya, salah satu informan menyatakan bahwa meskipun seorang calon pernah terjerat kasus korupsi, kinerja politik yang pernah ditunjukkan tetap dapat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperlihatkan bahwa decision value tidak selalu diartikan sebagai penolakan mutlak terhadap mantan narapidana korupsi, melainkan sebagai perhitungan rasional atas konsekuensi pilihan. Dalam kerangka ini, kinerja politik yang nyata dianggap memiliki nilai lebih tinggi daripada sekadar status bersih dari kasus hukum. Pandangan serupa juga terlihat pada responden lain yang menekankan pentingnya visi, misi, dan potensi pembangunan dari calon yang bersangkutan. Meskipun menyadari bahwa kandidat tertentu pernah terlibat kasus korupsi, mereka memandang bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperbaiki diri dan membuktikan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, decision value dalam kasus ini terbentuk dari kalkulasi antara risiko masa lalu dengan peluang masa depan. Pemilih menilai bahwa kasus korupsi bisa saja dilakukan oleh siapa saja, termasuk kandidat yang selama ini terlihat bersih, sehingga yang lebih utama adalah prospek konkret yang ditawarkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara, dapat dipahami bahwa generasi milenial dalam konteks ini lebih menekankan aspek kinerja, reputasi, serta rekam jejak politik ketika mengambil keputusan elektoral. Mereka tidak serta-merta menganggap latar belakang korupsi sebagai penghalang absolut, melainkan menempatkannya sebagai salah satu faktor yang dibandingkan dengan kinerja nyata yang telah ditunjukkan. Dengan demikian, keputusan memilih tetap dilandasi oleh decision value, yaitu kalkulasi atas manfaat dan kerugian dari setiap alternatif pilihan. Fenomena ini menegaskan bahwa preferensi generasi milenial tidak bersifat hitam putih, melainkan fleksibel dan pragmatis, karena menimbang potensi keberhasilan politik seorang calon di masa depan.

Decision value dalam konteks ini juga memperlihatkan adanya orientasi rasional yang menekankan kepentingan jangka panjang daripada sekadar kepuasan emosional sesaat. Pemilih milenial menimbang apakah calon yang dipilih memiliki kapasitas untuk mendorong pembangunan, menciptakan stabilitas politik, dan menjaga kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, meskipun faktor moralitas tetap relevan, keputusan akhir lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi realistis mengenai manfaat yang dapat diperoleh. Orientasi ini menunjukkan bahwa pemilih milenial cenderung menafsirkan politik sebagai arena pragmatis yang menuntut kompromi antara idealisme dan kebutuhan praktis. Decision value juga berfungsi sebagai mekanisme untuk merasionalisasi dilema politik yang dihadapi pemilih. Generasi milenial menyadari bahwa tidak ada kandidat yang sepenuhnya bebas dari risiko, termasuk kandidat yang selama ini dianggap bersih dari korupsi. Oleh karena itu, mereka membangun rasionalisasi bahwa memilih calon dengan kinerja yang terbukti, meskipun memiliki catatan hukum di masa lalu, bisa lebih bermanfaat daripada memilih calon yang reputasinya bersih tetapi minim kontribusi nyata. Rasionalisasi ini menjelaskan fleksibilitas

generasi milenial dalam pengambilan keputusan politik, di mana kalkulasi untung-rugi jangka panjang menjadi dasar utama yang mengarahkan preferensi elektoral mereka.

Decision value yang ditunjukkan oleh generasi milenial merefleksikan logika pilihan rasional dalam ranah politik elektoral. Mereka memahami bahwa kandidat yang bersih dari kasus hukum tidak serta-merta menjamin kualitas kinerja di masa depan, sementara kandidat yang pernah bermasalah tetap berpotensi menunjukkan prestasi nyata. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih mantan narapidana korupsi dengan catatan kinerja politik yang memuaskan dipandang sebagai pilihan yang memiliki nilai konsekuensi lebih tinggi dibandingkan kandidat bersih yang minim prestasi. Dengan demikian, generasi milenial memperlihatkan kecenderungan untuk menyeimbangkan pertimbangan moral, reputasi politik, dan kinerja aktual dalam menentukan arah dukungan politiknya.

4. Simpulan

Fenomena pilihan politik generasi milenial dalam demokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa perilaku elektoral mereka dapat dijelaskan melalui kerangka rational choice theory dengan dua dimensi utama, yaitu experience value dan decision value. Melalui experience value, generasi milenial menunjukkan kecenderungan untuk menolak kandidat mantan narapidana korupsi karena pengalaman buruk yang ditinggalkan oleh kasus korupsi sebelumnya. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, pengalaman politik negatif menjadi dasar rasional yang kuat untuk menggeser pilihan mereka kepada kandidat baru yang dianggap lebih bersih meskipun belum memiliki rekam jejak yang menonjol. Dengan demikian, pengalaman empirik menjadi faktor penentu yang membentuk preferensi politik generasi muda.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua generasi milenial menutup peluang bagi kandidat mantan narapidana korupsi. Pada tataran decision value, sebagian pemilih tetap mempertimbangkan kandidat bermasalah apabila kandidat tersebut mampu menunjukkan visi, misi, serta rekam jejak kinerja yang jelas dan memuaskan. Dalam konteks ini, rasionalitas pemilih dibentuk oleh kalkulasi konsekuensi di masa depan, bukan semata-mata oleh pengalaman negatif di masa lalu. Pemilih menilai bahwa kandidat yang bersih dari kasus hukum tidak otomatis menjamin kualitas kinerja di masa depan, sementara kandidat yang pernah tersandung kasus tetap berpotensi memberikan kontribusi nyata apabila memiliki kapasitas kepemimpinan dan reputasi kerja yang baik. Hal ini menegaskan bahwa rasionalitas politik generasi milenial bersifat fleksibel dan pragmatis, di mana moralitas, reputasi, dan kinerja aktual ditempatkan secara seimbang dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa perilaku politik generasi milenial di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi antara “menolak” atau “menerima” mantan narapidana korupsi. Sebaliknya, preferensi mereka terbentuk melalui interaksi antara pengalaman masa lalu dan kalkulasi prospek masa depan. Experience value menjelaskan mengapa sebagian besar milenial bersikap antipati terhadap kandidat koruptif, sedangkan decision value menjelaskan mengapa sebagian lainnya masih membuka ruang bagi kandidat bermasalah apabila kinerjanya terbukti memuaskan. Kedua dimensi ini menegaskan relevansi teori pilihan rasional dalam membaca perilaku pemilih muda, sekaligus memberikan implikasi penting bagi dinamika demokrasi di Indonesia. Bagi partai politik dan kandidat, temuan ini menjadi peringatan bahwa isu korupsi tetap menjadi determinan utama dalam pembentukan preferensi elektoral, sementara bagi akademisi, kajian ini membuka ruang analisis baru mengenai

bagaimana generasi muda menyeimbangkan idealisme moral dengan pragmatisme politik dalam konteks demokrasi kontemporer.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

References

- Ali, H., & Purwandi, L. (2016). *Indonesia 2020: The urban middle-class millennial*. Alvara Research Center.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik pemilih berdasarkan kelompok umur pada Pemilu 2019*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American voter*. University of Chicago Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
- Gafur, Annisa, Abdul. “Di Balik Pilkada Kendari dan Keluarga Abunawas”. 11 Februari 2017. <https://www.kompasiana.com/gafurabdul/589e754cbd22bdfa04dd6c95/di-balik-pilkada-kendari-dan-keluarga-abunawas>
- Grönlund, K., & Setälä, M. (2012). In honest officials we trust: Institutional confidence in Europe. *The American Review of Public Administration*, 42(5), 523–542. <https://doi.org/10.1177/0275074011412946>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1948). *The people's choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign* (2nd ed.). Columbia University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhaerah, M. (2019). Persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan anggota korupsi (Studi pada mahasiswa PPKN FIS UNM). [Skripsi, Universitas Negeri Makassar].
- Pratama, D., Widodo, T., & Maulia, S. T. (2023). Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Milenial. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(1). 79-89. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.280>
- Putri, Z. A. (2018, August 29). Peneliti LIPI nilai kaum milenial suka pemimpin rasional. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4187545/peneliti-lipi-nilai-kaum-milenial-suka-pemimpin-rasional>
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, voters, and clientelism*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107324909>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 379–399. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>
- Tapsell, R. (2018). The smartphone as the “weapon of the weak”: Assessing the role of communication technologies in Malaysia’s regime change. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(3), 74–99.
- Transparency International. (2020). *Corruption perceptions index 2020*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>